**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA MELALUI BERAS SEJAHTERA DI DESA TONGKO KECAMATAN BAROKO**

**KABUPATEN ENREKANG**

**St. Halima, Dr. Sakaruddin, M.Si, Drs. H. Syakhruddin. DN, M. Si.**

St Halima

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

PMI/Kons. Kesejahteraan Sosial

Email: halimasitti660@gmail.com, mandjarreki@yahoo.co.id, syakhruddin@gmail.com

**Abstrack;**

*This research raises the problem of “how is social empowerment throught welfare rice assistance for underprivileged families in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency”, with sub-problems, namely: how is process of social empowerment through welfare rice assistance for underprivileged families in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency? And how to get involved in the process of social empowerment through welfare rice assistance for underprivileged families in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency?This research uses descriptive qualitative research which is located in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency. The research approach used is a psychological approach, a sociological approach, and the primary data source of this research is the village head (key informant), additional information, namely underprivileged families, prosperous rice aid recipients but not including underprivileged families and the commite (assessor) of prosperous rice. Secondary data sourses are books, magazines, newspapers and other date sources that can complement the data. Data methods are observation, indepth interviews, and documentation, Data analiysis was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.The results showed that, the process of social empowerment through prosperous rice for underprivileged families in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency, namely, the social preparatrion stage, the program implementation and control stage, and the monitoring ang evaluation program stage. Obstacles in the process of social emprowerment through prosperous rice for underprivileged families in Tongko Village, Baroko District, Enrekang Regency, namely the data collection system is still nepotic, and the problem of leveraging and validating data. The implication of this research is that the village government and its staff are transparent in relation to the issue of assistance from the government, directed at the state which collects the data evenly to the community.*

*Keywords: Empowerment Prosperous Rice Well-being*

1. **Latar Belakang**

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga. Dari serangkaian cara dan strategi tersebut, masih berorientasi pada pengembangan infrastruktur, bantuan kredit, dan bantuan pendidikan. Padahal kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, yang melibatkan banyak faktor termasuk kelembagaan lokal dan modal sosial. Namun kondisi modal sosial saat ini menunjukkan kecenderungan penurunan sehingga diperlukan upaya untuk pembenahan modal sosial dalam kelembagaan lokal yang ada.

Pemerintah adalah organisasi yang mewakili kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang. Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara rebuplik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan. Kesejahteraan umum dapat ditingkatkan apabila kemiskinan dapat dikurangi. Kemiskinan dapat dikurangi apabila ada pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat dilaksanaan dan stabilitas keamanan tidak terkendali, akan berdampak meningkatnya tingkat kemiskinan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut bisa terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangannya secara optimal sehingga mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan negara, sebagai pemerintah harus bisa menjalankan suatu sistem pemerintahan sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pelayanan yang baik di masyarakat.

Fungsi pemerintahan yaitu melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan. Dalam fungsi pelayanan, pemerintah sebagai aparatur negara berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam fungsi pembangunan, pemerintah sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tetapi juga mental spiritual.

Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Sedangkan pengaturan diterapkan sebagai regulator yang mengatur jalannya sistem pemerintahan sehingga tercipta kestabilan dalam berbagai bidang, hal ini agar dapat mempermudah pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam agama Islam agar tidak di pandang gagal dalam melaksanakan aturan dan hukum Islam yang sudah ditetapkan, maka dalam berusaha menanamkan kesadaran diri untuk saling membantu, sedekah, dan memberikan bantuan kepada fakir miskin, serta mencari usaha untuk menyelamatkan kemiskinan pada masyarakat.

1. **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi. Lokasi penelitian terletak di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari Kepala Desa, masyarakat penerimana bantuan, pendamping. Sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data primer.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Desa Tongko**

Wilayah Desa Tongko sebelumnya termasuk wilayah desa Baroko, nama desa Tongko diambil dari nama sebuah gunung yang bersejarah yaitu gunung Tongko, dimana gunung tersebut digunaka oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman sekaligus sebagai empat pertahanan untuk mengahdapi penjajah sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 1996 desa Baroko dmekarkan dengan maksud agar pelayanan kepada masyarakat lebih mudah. Dari hasil Pemekaran tersebut terbentuk persiapan desa Tongko tahun 1996 – 1999. Berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri pada tahun 1999 Desa Tongko resmi menjadi desa definitif di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

1. ***Proses Pemberdayaan Sosial melalui Beras Sejahtera bagi Keluarga Prasejahtera***

Pembangunan sebagai suatu proses untuk melakukan perubahan yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan untuk mengubah suatu keadaan masyarakat menjadi kearah lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga prasejahtera. Biasanya pemerintah hanya luwes kepada keluarga terdekatnya untuk diberikan bantuan tanpa melalui data-data yang konkrit sehingga masih banyak masyarakat atau keluarga yang belum mendapatkan haknya. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika dimasukkannya kebutuhan sosial, karena suatu program pembangunan ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan hanya masyarakat atau kelompok sasaran sendiri yang mengetahui apa yang mereka butuhkan agar pembangunan tersebut dinilai merata dan mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka yang lebih baik.

Pembangunan sosial yang dimaksudkan sebagai suatu strategi melalui penyaluran berbagai program-program pelayanan sosial secara cepat dan langsung kepada kelompok sasaran, sehingga program beras sejahtera ini dapat sesuai dengan sasarannya dan meringankan beban keluarga serta mengurangi kondisi kemiskinan pada keluarga prasejahtera tersebut. Dalan hal ini, untuk mewujudkan dari prrogram beras sejahtera ini sesuai dengan sasaran maka pemerintah setempat harus mendata sesuai kriteria yanh mendapatkan beras sejahtera tersebut sehingga beras sejahtera yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran atau tidak padang bulu. Tetapi dalam keberhasilan dan tepat sasarannya beras sejahtera ini kepada masyarakat maka perlu ada proses yang dilakukan oleh pemerintah setempat, proses itu dimaksudkan agar beras yang telah di subsidikan pemerintah untuk masyarakat kelas menengah kebawa maka yang perlu dilakukan adalah:

1. **Tahap Persiapan Sosialisasi**

Pemerintah harus memberikan data-data yang konkrit serta transparansi kepada masyarakatnya agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. Transparansi ini tujuannya adalah ntuk memberikan sosialisasi kepada penerima program beras sejahtera terkait arus informasi, berita, agar tidak ada ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat terutama keluarga prasejahtera. Karena masyarakat harus mendapatkan informasi yang aktual dan terpercaya serta akurat, jujur dan benar dari orang yang diberikan wewenang dalam menyampaikan informasi.

Tahir selaku kepala desa mengatakan bahwasanya, selaku pemerintah desa mempersiapkan sosialisasi kepada massyarakat di Desa Tongko tentang beras pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera yang diperuntukkan untuk keluarga prasejahtera, yang artinya keluarga yang masih sangat minim pendapatan bahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup, hal ini jga agar pemberdayaan sosial untuk keluarga prasejahtera melalui beras sejahtera dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya memberikan transparansi kepada masyarakat di Desa Tongko, dengan tujuan agar tidak ada kesalahpahaman terkait informasi proses pemberdayaan melalui beras sejahtera. Tujuan dilakukannya transparansi terhadap masyarakat agar nantinya tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan yang membuat masyarakat resah apalagi sekarang banyak yang menjadi provokator soal seperti karena hal seperti ini sangat sensitif dimata masyarakat.

Sudarmin selaku pendamping pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera mengatakan bahwasanya, ketika sudah ada informasi dari kemensos dan sudah diperintahkan oleh pemerintah desa untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Tongko, kami akan turrun memberikan informasi terkait masalah pemberdayaan sosial yang melalui beras sejahtera dan diperuntukkan untuk keluarga prasejahtera saja, hal ini sangat perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar kami bisa mengenditifikasi sasaran dari program dari pemerintah pusat agar nantinya tidak ada kesalahan dalam mengambil data di masyarakat.

1. **Tahap Pelaksanaan dan Pengendallian Program**

Tahap Pelaksanaan dan Pengendallian Program tentang proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera adalah, masyarakat harus mengetahui proses dan pencairan dari beras sejahtera itu sendiri, serta harus mengetahui proses pendistribusian beras sejahtera yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keluarga prasejahtera sebagai bentuk proses pemberdayaan sosial. Masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, akan tetapi tidak semua itu kebijkan yang dikeluarkan pemerintah harus diterima tetapi juga bisa ditolak tergantung dari hasil yang disampaikan oleh pemerintah itu sendiri.

Sudarmin mengungkapkan bahwa agar proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera untuk keluarga prasejahtera bisa tepat sasaran. perlu ada memang pertisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam proses pelaksanaan terakit masalah beras sejahtera agar dapat dikendalikan pendistribusian beras sejahtera tersebut sehingga sesuai dengan sasaran dari pemerintah pusat, karena beras sejahtera hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang masih tergolong keluarga prasejahtera. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya salah satunya sembako.

1. **Membantu dalam Pengawasan**

Setiap masyarakat tidak boleh bersifat apatis terhadap hal-hal kepentingan masyarakat agar kesejahteraan dalam suatu masyarakat dapat merata secara menyeluruh, sehingga pemerintah desa setempat agar dapat berlaku adil kepada masyarakat siapa saja tanpa memandang sistem kekeluargaan atau nepotisme. Dalam hal ini dibutuhkan juga masyaakat untuk membantu untuk mengawasi proses pemberdayaam beras sejahtera yang ada di Desa Baroko sehingga dalam proses pendataan atau kategori yang layak untuk mendapatkan beras sejahtera itu sesuai dengan data yang diambil oleh pendata. Sehinga dalam hal ini diperlukan masyarakat untuk membantu dalam mengawasi prosesi dari beras sejahtera tersebut sehingga seorang pendata harus bersikap adil terhadap masyarakat tanpa memandang sistem kekeluargaan agar proses pemberdayaan beras sejahtera tepat sasaran.

***3. Kendala dalam Proses Pemberdayaan Sosial Melalui Bantuan Beras sejahtera bagi Keluarga Prasejahtera.***

Dalam proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera tidak terlepas dari kendala yang dihadapi oleh penyelanggara baik itu abgi pihak internal dari pemerintah ataupun darieksternal dari pemerintah, hal in yang mengakibatkan proses pemberdayaan sosial bagi keluarga prasejahtera melalui beras sejahtera tidak terlalu efektif dalam menjalankannya, pasalnya di Desa Tongko masih ada sistem kekeluargaan atau sistem nepotisme,sehingga ketika ada bantuan berupa bantuan sosial atau beras sejahtera mereka lebih mengutamakan keluarga dibanding masyarakat yang masih tergolong prasejahtera. Hal tersebut juga keluarga prasejahtera tidak dapat memenuhi kebutuhan sembakonya. Adapun kendala dalam proses pemberdayaan sosial melalui bantuan beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera yaitu:

1. **Sistem Nepotisme**

Proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera pasti tidak akan berjalan sesuai yang di inginkan oleh masyarakat jika masih saja menerapkan sistem kekeluargaan atau sistem nepotisme, karena banyak aparat desa hanya ingin jika keluarganya saja yang mendapatkan bantuan tersebut bukan orang yang layak dapat yang masih tergolong masih keluarga prasejahtera yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem nepotisme ini seakana-akan mencekik bagi masyarakat kelas bahah karena merasa tidak memiliki kuas untuk melakukan suatu tindakan padahalyagn seharusnya dilakukan oleh Aparat Desa adalah membantu masyarakat yang masih tergolong prasejahtera untuk mendapatkan bantua berupa beras sejahtera agar bisa meningkatkan taraf sosialnya juga, artinya dengan menerima bantua beras sejahtera gaji yang di dapatkan dari hasil berkebun atau kerja serabutan dan hasil buruh tani tidak dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sembakonya, karena sudah menerima bantuan beras sejahtera, sehingga gajinya dapat di manfaatkan dengan keperluan lainnya.

Badaria selaku warga Desa Tongko yang layak menerima bantuan beras sejahtera mengemukakan bahwa Ibu badaria mengaku tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini beras sejahtera, menurut pengakuannya bahwa Ibu Badaria tidak di data oleh panitia padahal ia sangat layak mendapatkan beras sejahtera tesebut. Ia menambahkan bahwa dalam keluarganya terdiri 3 kartu yang keluarga dengan masing-masing tiga kepala rumah tangga tapi ia mengaku tidak mendapatkan bantuan tersebut karena panitia lebih mendahulukan keluarga dekatnya dahulu untuk di data.

1. **Masalah Verifikasi Data dan Validasi**

Banyak kemungkinan sehingga masyarakat yang masih tergolong prasejahtera tidak menerima beras sejahtera, salah satunya masyarakat yang tergolong prasejahtera tidak terverifikasi datanya dan juga data yang di munculkan oleh kementrian sosial adalah data yang lama sehingga pendataan yang baru tidak mendapatkan beras sejahtera dari pemerintrah.

Sudarmin mengemukakan bahwa masyarakat tidak menerima bantua beras beras sejahtera dari pemerintah karena biasanya ada kesalahan data dari saat di input, serta data yanng dimunculkan oleh kementrian sosial adalah data-data yang sudah lama, sehingga kita tetap memberikan beras sejahtera ini kepada orang yang dimunculkan datanya oleh kementrian sosial.”[[1]](#footnote-2)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang masih tergolong keluarga prasejhtera tidak menerima bantua karena masalah validasi dan verifikasi data yang di input oleh panitia, serta data yang dimunculkan oleh kementrian sossial adalah data-data yang lama sehingga banyak keluarga prasejahtera tidak menerima bantua beras sejahtera.

1. **Penutup**
2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa:

* + - 1. Proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, pemerintah desa melakukan tahap persiapan sosial, dengan cara mensosialisasikan program dan mengindetifikasi program sasaran.Selanjutnya untuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan cara tahap pelaksanaan dan pengendalian program, dan yang terakhir tahap *monitoring* dan evalusiasi program.
			2. Kendala dalam proses pemberdayaan sosial melalui beras sejahtera bagi keluarga prasejahtera di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, yaitu proses pendataan masyarakat terkait masalah bantuan pemerintah terjadi sistem nepotisme karena banyak keluarga prasejahtera yang yang sudah lama tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah serta verifikasi dan dan validasi yang menjadi kendala karena data yang di input tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan beras sejahtera, bahkan data dari kementrian sosial adalah data yang lama.
			3. **Implikasi Penilitian**

Hendaknya pemerintah desa dan seluruh jajarannya tidak menganut sistem nepotisme.

Hendaknya panitia (pendata) melakukan pendataan secara merata terhadap masyarakat di Desa Tongko Kecamataan Baroko Kabupaten Enrekang

**DAFTAR PUSTAKA**

Asrul Nurdin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengemis dan Pengamen, *skrips*i, Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik, 2008.

BurhanBungin, *PenelitianKualitatif,* Cet. II; Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008.

Elvira Astuti Pane, “Efektivitas Distribusi Beras Sejahtera (Rakin) untuk Masyarakat Miskin di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinnggiraja Kabupaten Asahan” *Skripsi*-Universitas Sumatera Utara, 2018.

Hary Suryanto, Implementasi program peningkatan kemandirian perempuan di Kecamatan Sumarong Kabupaten Mamasa, *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar 2011.

Hesti Safrotul Qudsiyah, “Inovasi Kebijakan Polosi Peduli Sesama di Sesama di Desa Ngantru dan Desa Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek” *Skripsi-* Universirtas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ida Nurjannah, “ Analis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Tinau dari Prespektif Ekonomi Islam” *Skripsi*-Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2017.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Teori dan Praktik.

IrwanSoehartono, *MetodePenelitianSosial*, Cet.VII; Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2008.

Jamhari Makruf, *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat,* (Cet.I; Banten : Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 2016.

Jheniar Evriliany Akmel, “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (RASKIN) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2018.

Kementrian Sosial RI, *Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018*, Jakarta: 2017.

Lexy J. Maleong, *MetodologiPenelitianKualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Linda Susanti, “Tujuan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi di Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah” *Skripsi*-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek,* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2008 yang di Kutip Mira Yeti dalam *skripsi*, “Pendistribusian Beras Miskin di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Kasim,2011.

Menurut Kementrian Sosial (Ditjen PFM Kemensos) yang dikutip Anggi Tondi Marton dalam we, “Kemensos Evaluasi Penyaluran Bansos Demi Mewujudkan 6T”, <https://www.google.com/amp/s/www.medcom.id/amp/4ba2mzJK-kemensos-evaluasi-penyaluran-bansos-demi-mewuudkan-6t>, (09 Desember 2018).

Menurut Sumodigrat yang dikutip oleh Yenny Indra Rahmawati dalam Skripsi, (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Provvinsi Jawa Timur” *Skripsi*-Institut Pertanian Bogor, 2006.

Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (cet, I; Makassar: Alauddin Press, 2013.

Rafika Pratiwi, (Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (*Skripsi*-Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016),61.

S. Nasution, *Metode Research,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatifKualitatif, dan R&D* (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017.

1. Sudarmin (36), *Wawancara*, Pendamping atau Panitia Beras Sejatera, di Desa Tongko Kecamatan Barako Kabupaten Enrekang, 7 Agustus 2020. [↑](#footnote-ref-2)